BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2011tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu

Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);

21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal I

Ketentuan Pasal 40 dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 40

Nomor Kode Lokasi terdiri dari 14 (empat belas) digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri atas :

a. kode komponen pemilikan barang;
b. kode propinsi;
c. kode kabupaten;
d. kode bidang;
e. kode unit kerja/SKPD;
f. kode tahun pembelian; dan
g. kode sub unit/satuan kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF HIERARKHIS	
KEPALA DPPKAD	
SEKRETARIS DPPKAD	
KABID ASET DPPKAD	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Januari 2013

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 7 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR NOMOR KODE LOKASI

NO	NAMA BIDANG	NAMA UNIT KERJA DAN SUB UNIT KERJA	NOMOR KODE LOKASI						
			BARANG DAERAH	PROVINSI	KABUPATEN	BIDANG	UNIT KERJA	TAHUN BELI	SUB UNIT
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DPRD	SEKRETARIS DEWAN	12	22	19	01	01	00	01
		BAGIAN UMUM	12	22	19	01	01	00	02
		BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	12	22	19	01	01	00	03
		BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	22	19	01	01	00	04
2.	BUPATI	BUPATI	12	22	19	02	01	00	01
3.	WAKIL BUPATI	WAKIL BUPATI	12	22	19	03	01	00	01
4.	SEKRETARIAT	SEKRETARIS DAERAH	12	22	19	04	01	00	01
	DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	12	22	19	04	02	00	01
		BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN UMUM	12	22	19	04	02	00	02
		BAGIAN ADM. KEMASYARAKATAN DAN KESRA	12	22	19	04	02	00	03
		BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	12	22	19	04	02	00	04
		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	12	22	19	04	03	00	01
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12	22	19	04	03	00	02
		BAGIAN ADM. SUMBER DAYA ALAM	12	22	19	04	03	00	03
		BAGIAN ADM . PEREKONOMIAN	12	22	19	04	03	00	04
		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	12	22	19	04	04	00	01
		BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	22	19	04	04	00	02
		BAGIAN UMUM	12	22	19	04	04	00	03
		BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA	12	22	19	04	04	00	04
5.	KIMPRASWIL/PU	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	12	22	19	05	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	05	01	00	02
		BIDANG BINA MARGA	12	22	19	05	01	00	03
		BIDANG CIPTA KARYA	12	22	19	05	01	00	04
		BIDANG PENATAAN RUANG	12	22	19	05	01	00	05
		BIDANG PENGAIRAN	12	22	19	05	01	00	06
		BIDANG KEBERSIHAN	12	22	19	05	01	00	07
6.	PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	12	22	19	06	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	06	01	00	02
		BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN UDARA	12	22	19	06	01	00	03
		BIDANG PERHUBUNGAN LAUT	12	22	19	06	01	00	04
		BIDANG TEKNIS SARANA DAN PRASARANA	12	22	19	06	01	00	05
7.	KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	12	22	19	07	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	07	01	00	02
		BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	12	22	19	07	01	00	03
		BIDANG BINA PENGENDALIAN PENYAKIT & PENY.LINGKUNG	12	22	19	07	01	00	04
		BIDANG BINA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	12	22	19	07	01	00	05
		UPTD GUDANG FARMASI	12	22	19	07	01	00	06
		BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN FARMAS	12	22	19	07	01	00	07
		DIREKTUR RSUD ANDI JEMMA	12	22	19	07	02	00	01
		BAGIAN TATA USAHA	12	22	19	07	02	00	02
		BIDANG PELAYANAN ASUHAN DAN KEPERAWATAN	12	22	19	07	02	00	03
		BIDANG REKAM MEDIK, PENGAWASAN & PENGENDLN	12	22	19	07	02	00	04
		BIDANG PERENC.. PENGEMB. & PEMELIHARAAN	12	22	19	07	02	00	05
		PUSKESMAS SABBANG	12	22	19	07	03	00	01
		PUSKESMAS BAEBUNTA	12	22	19	07	03	00	02
		PUSKESMAS LIMBONG	12	22	19	07	03	00	03

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		PUSKESMAS SEKO	12	22	19	07	03	00	04
		PUSKESMAS MASAMBA	12	22	19	07	03	00	05
		PUSKESMAS RAMPI	12	22	19	07	03	00	06
		PUSKESMAS MALANGKE	12	22	19	07	03	00	07
		PUSKESMAS MALANGKE BARAT	12	22	19	07	03	00	08
		PUSKESMAS MAPPEDECENG	12	22	19	07	03	00	09
		PUSKESMAS SUKAMAJU	12	22	19	07	03	00	10
		PUSKESMAS BONE-BONE	12	22	19	07	03	00	11
		PUSKESMAS LARA	12	22	19	07	03	00	12
8.	**PENDIDIKAN DAN**	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	12	22	19	08	01	00	01
	KEBUDAYAAN	SEKRETARIAT	12	22	19	08	01	00	01
		BIDANG PENDIDIKAN DASAR	12	22	19	08	01	00	01
		BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN KEJURUAN	12	22	19	08	01	00	01
		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL & INFOR	12	22	19	08	01	00	01
		SMA NEG. 1 SABBANG	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 BAEBUNTA	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 2 BAEBUNTA	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 3 BAEBUNTA	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 LIMBONG	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 SEKO	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 RAMPI	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 2 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	02
		SMK NEG. 1 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 MALANGKE	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG.1 MALANGKE BARAT	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 MAPPEDECENG	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 SUKAMAJU	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 2 SUKAMAJU	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 1 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	02
		SMA NEG. 2 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	02
		SMK NEG. 1 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	02
		SMP NEG. 1 SABBANG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 SABBANG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 SABBANG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 4 SABBANG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 5 SABBANG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 6 SABBANG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 7 SABBANG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 BAEBUNTA	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 BAEBUNTA	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 BAEBUNTA	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 LIMBONG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 LIMBONG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 SEKO	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 SEKO	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 SEKO	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 4 SEKO	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 4 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 5 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 RAMPI	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 RAMPI	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 MAPPEDECENG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 MAPPEDECENG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 MAPPEDECENG	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 MALANGKE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 MALANGKE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 MALANGKE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 4 MALANGKE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 5 MALANGKE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 6 MALANGKE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 MALANGKE BARAT	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 MALANGKE BARAT	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 MALANGKE BARAT	12	22	19	08	01	00	03

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		SMP NEG. 1 SUKAMAJU	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 SUKAMAJU	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 SUKAMAJU	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 4 SUKAMAJU	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 1 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 2 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 3 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 4 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	03
		SMP NEG. 5 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	03
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. SABBANG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 001 MARI-MARI	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 002 TOKATIMBANG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 003 POMPANIKI	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 004 KALOTOK	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 005 TONANGKA	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 006 BATU ALANG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 007 TETE URI	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 008 DANDANG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 009 TARUE	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 010 RANTE BONE	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 011 RANTE PASANG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 012 BUNTU TORPEDO	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 013 PADANG SARRE	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 014 TINIMPONG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 015 BAKKA	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 016 SALULIMBONG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 017 SABBANG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 018 POMBUNTANG	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 019 PONGO	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 020 MANGKALUKU	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 021 MONTO	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 022 PARARRA	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 023 LENA	12	22	19	08	01	00	04
		SDN 024 TANDUNG	12	22	19	08	01	00	04
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. BAEBUNTA	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 025 LIMPOMAJANG	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 026 BAEBUNTA	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 027 BENTENNA	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 028 SABBANG LOANG	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 029 SASSA	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 030 BUSO	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 031 TAROBOK	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 032 TOLIBUKANG	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 033 AWO-AWO	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 034 RANTE PACCU	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 035 BARANAE	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 036 PALANDAN	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 037 RAMBUBELUE	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 038 SALULEMO	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 039 PADANG	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 040 RADDA	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 041 PETAMBUA	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 042 MELI	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 043 TETE INDUK	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 044 SALU BONE	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 045 LARA UTAMA	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 046 LARA I	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 047 LARA II	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 048 LARA III	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 049 LARA IV	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 050 DADEKO	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 051 MANGKALLANG	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 052 TEPPO	12	22	19	08	01	00	05
		SDN 053 LAWEWE	12	22	19	08	01	00	05
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. LIMBONG	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 054 KANANDEDE	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 055 SALUKANAN	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 056 BALANNALU	12	22	19	08	01	00	06

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		SDN 057 URI	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 058 KAMBO	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 059 MINANGA	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 060 MANGANAN	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 061 LIMBONG	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 062 SALUTALLANG	12	22	19	08	01	00	06
		SDN 063 PARANTA	12	22	19	08	01	00	06
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. SEKO	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 064 ENO	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 065 RANTE KUSUMMAMG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 066 SINGKALONG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 067 LENGKONG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 068 PARAHALEANG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 069 PADANG BALUA	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 070 BANA	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 071 TANETE	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 072 TURONG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 073 BUSAK	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 074 LODANG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 075 LAMBIRI	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 076 AMBALLONG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 077 PEWANEANG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 078 POYAHAANG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 079 TANETE BABA	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 080 POKAPPANG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 081 HOYANE	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 082 KARIANGO	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 083 MALIMONGAN	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 084 SIPULUNG	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 085 RANTE DANGA	12	22	19	08	01	00	07
		SDN 086 LEDAN	12	22	19	08	01	00	07
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. MASAMBA	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 087 KATOKKOAN	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 088 MATOTO	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 089 MASAMBA	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 090 INDOKORO	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 091 BONE	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 092 LINDU	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 093 PANDAK	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 094 LABA	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 095 LEBANNU	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 096 KUAU	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 097 ROMPU	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 098 PONGO	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 099 BALEBO	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 100 LAMARANGINANG	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 101 MAIPI	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 102 TONDOK TUA	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 103 KARAWAK	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 104 PINCARA	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 105 LEMBANG BATU	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 106 SEPAKAT	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 107 TORADDA	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 219 TORADDA	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 220 POMBAKKA	12	22	19	08	01	00	08
		SDN 221 BALAKALA	12	22	19	08	01	00	08
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. RAMPI	12	22	19	08	01	00	09
		SDN 107 DODOLO	12	22	19	08	01	00	09
		SDN 108 ONONDOWA	12	22	19	08	01	00	09
		SDN 109 LEBONI	12	22	19	08	01	00	09
		SDN 110 BANGKO	12	22	19	08	01	00	09
		SDN 216 TEDEBOE	12	22	19	08	01	00	09
		SDN 217 SULAKU	12	22	19	08	01	00	09
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. MAPPEDECENG	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 111 MAPPEDECENG	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 112 TOBULO	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 113 HARAPAN	12	22	19	08	01	00	10

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		SDN 114 URASO	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 116 TARRA TALLU	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 117 CENDANA PUTIH II	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 118 RAMAYANA	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 119 CENDA PUTIH III	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 120 GONTANG	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 121 UJUNG MATAJANG	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 122 CENDANA PUTIH IV	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 123 MEKAR JAYA	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 124 SUMBER WANGI	12	22	19	08	01	00	10
		SDN 115 BENTENG	12	22	19	08	01	00	10
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. MALANGKE	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 125 UDU	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 126 PUTEMATA	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 127 SALUBANCE	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 128 PADANGALLE	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 129 PATTIMANG	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 130 PETTA MALANGKE	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 131 PINCE PUTE	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 132 TAPPONG	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 133 TOKKE	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 134 CAPPASOLO	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 135 RAMPOANG	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 136 TAKKALALA	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 137 MAKITTA	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 138 SUMBER AGUNG	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 139 TOLADA	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 140 LUMU-LUMU	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 141 PASSORONGAN	12	22	19	08	01	00	11
		SDN 222 BIRUE	12	22	19	08	01	00	11
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. MALANGKE BARAT	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 142 POMBAKKA	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 143 ARUSU	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 144 SALU BONGKO	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 145 LAMIKO-MIKO	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 146 WAELAWI	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 147 LABBU	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 148 AMASSANGAN	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 149 BAKU-BAKU	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 150 PAO	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 151 PENGKAJOANG	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 152 CENNING	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 153 MATTIROWALIE	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 154 LAYAR PUTIH	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 155 URUKUMPANG	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 156 RANTELANGI	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 157 KALITATA	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 158 LIMBONG WARA	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 159 PEMBUNIANG	12	22	19	08	01	00	12
		SDN 160 LANDUNG DOU	12	22	19	08	01	00	12
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. SUKAMAJU	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 161 LAMPUAWA	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 162 MINANGA TALLU	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 163 TAMBOKE	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 164 KALUKU	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 165 SALULEMO	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 166 SAPTA MARGA	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 167 TULUNG INDAH I	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 168 TULUNG INDAH II	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 169 KETULUNGAN	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 170 TULUNG SARI I	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 171 TULUNG SARI II	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 172 SUKAMAJU I	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 173 SUKAMAJU II	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 174 SUKADAMAI	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 175 SUKAMUKTI	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 176 SIDORAHARJO	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 177 TOLANGI	12	22	19	08	01	00	13

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		SDN 178 MULYOREJO I	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 179 MULYOREJO II	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 180 RAWAMANGUN I	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 181 RAWAMANGUN II	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 182 WONOKERTO I	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 183 SUMBER BARU	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 184 SUBUR	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 185 PAOMACANG	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 223 SUKAHARAPAN	12	22	19	08	01	00	13
		SDN 224 LINO	12	22	19	08	01	00	13
		CABANG DINAS DIKORDA KEC. BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 186 LEMAHABANG	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 187 BONE-BONE	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 188 MAKUNYI	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 189 BAMBA	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 190 MUKTISARI	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 191 BANYUURIP	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 192 KOPI-KOPI	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 193 TAMUKU	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 194 TONDOK KURRA	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 195 SUKARAYA	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 196 BATANG TONGKA	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 197 PONGKO	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 198 KARANGAN	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 199 SIDOMUKTI	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 200 SIDOMULYO	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 201 SIDOMAKMUR	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 202 PATILA	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 203 PEMBASEAN	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 204 SIDOBINANGUN	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 205 TONDOK TANGNGA	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 206 RAMPOANG	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 207 KARONDANG	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 208 MUNTE	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 209 SUMBERDADI	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 210 MINNA	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 211 BERINGIN	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 212 BUNGADIDI	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 213 KULURI	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 214 TANETE	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 215 POREANG	12	22	19	08	01	00	14
		SDN 225 BANTIMURUNG	12	22	19	08	01	00	14
		KEPALA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN & PARIWISATA	12	22	19	08	02	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	08	02	00	02
		BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	12	22	19	08	02	00	03
		BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	12	22	19	08	02	00	04
		BIDANG KEBUDAYAAN	12	22	19	08	02	00	05
		BIDANG PARAWISATA	12	22	19	08	02	00	06
9.	**SOSIAL**	KEPALA DINAS SOSNAKERTRANS	12	22	19	09	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	09	01	00	02
		BIDANG SOSIAL	12	22	19	09	01	00	03
		BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA	12	22	19	09	01	00	04
		BIDANG TRANSMIGRASI	12	22	19	09	01	00	05
		KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASY. & PEM. DESA	12	22	19	09	02	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	09	02	00	02
		BIDANG PEMERINTAHAN DESA	12	22	19	09	02	00	03
		BIDANG PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN	12	22	19	09	02	00	04
		BIDANG KETAHANAN MASY. DESA DAN KELURAHAN	12	22	19	09	02	00	05
		BIDANG USAHA EKONOMI DESA DAN KELURAHAN	12	22	19	09	02	00	06
		KEPALA KANTOR LATIHAN KERJA	12	22	19	09	03	00	01
		SUB. TATAT USAHA	12	22	19	09	03	00	02
		SEKSI KEMITRAAN DAN BURSA KERJA	12	22	19	09	03	00	03

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		SEKSI PERENC. DAN PENGEMBANGAN PELATIHAN	12	22	19	09	03	00	04
		SEKSI PELATIHAN	12	22	19	09	03	00	05
		KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	12	22	19	09	04	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	09	04	00	02
		BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	12	22	19	09	04	00	03
		BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	12	22	19	09	04	00	04
		BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	12	22	19	09	04	00	05
10.	KEPENDUDUKAN	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANCAPIL	12	22	19	10	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	10	01	00	02
		BIDANG KEPENDUDUKAN	12	22	19	10	01	00	03
		BIDANG CATATAN SIPIL	12	22	19	10	01	00	04
		BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN ADM. KEPENDUDUKAN	12	22	19	10	01	00	05
		BIDANG PENDATAAN DAN PENGARSIPAN KEPENDUDUKAN	12	22	19	10	01	00	06
		KEPALA BADAN KB DAN PEMB.PEREMPUAN	12	22	19	10	02	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	10	02	00	02
		BIDANG DATA DAN INFORMASI PROGRAM	12	22	19	10	02	00	03
		BIDANG KELUARGA BERENCANA	12	22	19	10	02	00	04
		BIDANG KESEJAHTERAAN & PERGERAKAN MASYARAKAT	12	22	19	10	02	00	05
		BIDANG PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERL. ANAK	12	22	19	10	02	00	06
11.	PERTANIAN	KEPALA DINAS PERTANIAN	12	22	19	11	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	11	01	00	02
		BIDANG TANAMAN PANGAN	12	22	19	11	01	00	03
		BIDANG HORTIKULTURA	12	22	19	11	01	00	04
		BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	12	22	19	11	01	00	05
		BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	12	22	19	11	01	00	06
		KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	12	22	19	11	02	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	11	02	00	02
		BIDANG KEHUTANAN	12	22	19	11	02	00	03
		BIDANG PERKEBUNAN	12	22	19	11	02	00	04
		BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA	12	22	19	11	02	00	05
		KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12	22	19	11	03	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	11	03	00	02
		BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12	22	19	11	03	00	03
		BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA	12	22	19	11	03	00	04
		BIDANG KELAUTAN DAN PESISIR	12	22	19	11	03	00	05
		BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12	22	19	11	03	00	06
		KA. BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS. PENYULUH	12	22	19	11	04	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	11	04	00	02
		BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	12	22	19	11	04	00	03
		BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN & GIZI	12	22	19	11	04	00	04
		BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	22	19	11	04	00	05
		BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBINAAN KLP. TANI	12	22	19	11	04	00	06
		BPP KEC. SABBANG	12	22	19	11	04	00	07
		BPP KEC. BAEBUNTA	12	22	19	11	04	00	08
		BPP KEC. LIMBONG	12	22	19	11	04	00	09
		BPP KEC. SEKO	12	22	19	11	04	00	10
		BPP KEC. RAMPI	12	22	19	11	04	00	11
		BPP KEC. MASAMBA	12	22	19	11	04	00	12
		BPP KEC. MALANGKE	12	22	19	11	04	00	13
		BPP KEC. MALANGKE BARAT	12	22	19	11	04	00	14
		BPP KEC. MAPPEDECENG	12	22	19	11	04	00	15
		BPP KEC. SUKAMAJU	12	22	19	11	04	00	16
		BPP KEC. BONE-BONE	12	22	19	11	04	00	17
12.	PERINDUSTRIAN	KEPALA DINAS KOPERINDAG	12	22	19	12	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	12	01	00	02
		BIDANG KOPERASI DAN UKM	12	22	19	12	01	00	03
		BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN & PENGAWASAN BARANG BEREDAR	12	22	19	12	01	00	04
		BIDANG PERINDUSTRIAN	12	22	19	12	01	00	05
		BIDANG PERDAGANGAN	12	22	19	12	01	00	06

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	12	22	19	12	02	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	12	02	00	02
		BIDANG GEOLOGI & MIGAS	12	22	19	12	02	00	03
		BIDANG KETENAGALISTRIKAN	12	22	19	12	02	00	04
		BIDANG PERTAMBANGAN UMUM	12	22	19	12	02	00	05
		BIDANG PENGAWASAN	12	22	19	12	02	00	06
13.	PENDAPATAN	KEPALA DINAS PENDAPATAN,PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	22	19	13	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	13	01	00	02
		BIDANG PENDAPATAN DAERAH	12	22	19	13	01	00	03
		BIDANG ANGGARAN	12	22	19	13	01	00	04
		BIDANG AKUNTANSI	12	22	19	13	01	00	05
		BIDANG ASSET DAERAH	12	22	19	13	01	00	06
		BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL	12	22	19	13	02	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	13	02	00	02
		BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	12	22	19	13	02	00	03
		BIDANG PENGEMBANGAN KINERJA DAN PELAYANAN PENGADUAN	12	22	19	13	02	00	04
		BIDANG PENANAMAN MODAL	12	22	19	13	02	00	05
14.	PENGAWASAN	INSPEKTUR	12	22	19	14	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	14	01	00	02
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	12	22	19	14	01	00	03
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	12	22	19	14	01	00	04
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	12	22	19	14	01	00	05
15.	PERENCANAAN	KEPALA BAPPEDA	12	22	19	15	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	15	01	00	02
		BIDANG FISIK DAN PRASARANA	12	22	19	15	01	00	03
		BIDANG EKONOMI	12	22	19	15	01	00	04
		BIDANG SOSIAL BUDAYA	12	22	19	15	01	00	05
		BIDANG PENELITIAN DAN STATISTIK	12	22	19	15	01	00	06
		BIDANG PENANAMAN MODAL	12	22	19	15	01	00	07
16.	LINGKUNGAN	KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	12	22	19	16	01	00	01
	HIDUP	SUB BAGIAN TATA USAHA	12	22	19	16	01	00	02
		SEKSI ANALISA DAMPAK LINGK. HIDUP & LAB.	12	22	19	16	01	00	03
		SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN L.HIDUP	12	22	19	16	01	00	04
		SEKSI KONSERVASI SDA DAN PERTAMANAN	12	22	19	16	01	00	05
17.	PARIWISATA	.....							
18.	KESATUAN	KEPALA KESBANG	12	22	19	18	01	00	01
	BANGSA	SEKRETARIAT	12	22	19	18	01	00	02
		BIDANG INTEGRASI BANGSA	12	22	19	18	01	00	03
		BIDANG HUB. ANTAR LEMBAGA & DEMOKRASI	12	22	19	18	01	00	04
		BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12	22	19	18	01	00	05
		KEPALA KANTOR SAT. POL PAMONG PRAJA	12	22	19	18	02	00	01
		SUB BAGIAN TATA USAHA	12	22	19	18	02	00	02
		SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN & PEMBINAAN OPERASI	12	22	19	18	02	00	03
		SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH & PENYIDIKAN	12	22	19	18	02	00	04
		SEKSI PENGAWALAN DAN PENGEMB. KAPASITAS SATPOL P	12	22	19	18	02	00	05
19.	KEPEGAWAIAN	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	12	22	19	19	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	19	01	00	02
		BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI	12	22	19	19	01	00	03
		BIDANG DIKLAT APARATUR	12	22	19	19	01	00	04
		BIDANG DATA DAN INFORMASI PEGAWAI	12	22	19	19	01	00	05
		BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	12	22	19	19	01	00	06
20.	PENGHUBUNG	MESS PEMDA LUWU UTARA JAKARTA	12	22	19	20	01	00	01
		MESS PEMDA LUWU UTARA MAKASSAR	12	22	19	20	01	00	02
		MESS PEMDA LUWU UTARA SOROAKO	12	22	19	20	01	00	03

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
21	INFORMASI DAN	SUB BAGIAN TATA USAHA	12	22	19	21	02	00	02
	DOKUMENTASI	SEKSI PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA	12	22	19	21	02	00	03
		SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUSTAKA	12	22	19	21	02	00	04
		SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DAERAH	12	22	19	21	02	00	05
22.	BUMD	.....							
23.	KECAMATAN	CAMAT SABBANG	12	22	19	50	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	50	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	50	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	50	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA/KELURAHAN	12	22	19	50	01	00	05
		SEKSI KEPENDUDUKAN DAN PEMUKIMAN	12	22	19	50	01	00	06
		KELURAHAN MAROBO	12	22	19	50	02	00	01
		CAMAT BAEBUNTA	12	22	19	51	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	51	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	51	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	51	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA/KELURAHAN	12	22	19	51	01	00	05
		SEKSI KEPENDUDUKAN DAN PEMUKIMAN	12	22	19	51	01	00	06
		KELURAHAN SALASSA	12	22	19	51	02	00	01
		CAMAT LIMBONG	12	22	19	52	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	52	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	52	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	52	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA	12	22	19	52	01	00	05
		CAMAT SEKO	12	22	19	53	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	53	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	53	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	53	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA	12	22	19	53	01	00	05
		CAMAT RAMPI	12	22	19	54	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	54	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	54	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	54	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA	12	22	19	54	01	00	05
		CAMAT MASAMBA	12	22	19	55	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	55	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	55	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	55	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	12	22	19	55	01	00	05
		SEKSI KEPENDUDUKAN DAN PERMUKIMAN	12	22	19	55	01	00	06
		SEKSI KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	12	22	19	55	01	00	07
		KELURAHAN KAPPUNA	12	22	19	55	02	00	01
		KELURAHAN BONE	12	22	19	55	02	00	02
		KELURAHAN KASIMBONG	12	22	19	55	02	00	03
		KELURAHAN BALIASE	12	22	19	55	02	00	04
		CAMAT MALANGKE	12	22	19	56	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	56	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	56	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	56	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA/KELURAHAN	12	22	19	56	01	00	05
		SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESRA	12	22	19	56	01	00	06
		CAMAT MALANGKE BARAT	12	22	19	57	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	57	01	00	02
			12	22	19	57	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	57	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA/KELURAHAN	12	22	19	57	01	00	05
		SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESRA	12	22	19	57	01	00	06
		CAMAT MAPPEDECENG	12	22	19	58	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	58	01	00	02

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	58	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	58	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA/KELURAHAN	12	22	19	58	01	00	05
		SEKSI KEPENDUDUKAN DAN PEMUKIMAN	12	22	19	58	01	00	06
		CAMAT SUKAMAJU	12	22	19	59	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	59	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	59	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	59	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA/KELURAHAN	12	22	19	59	01	00	05
		SEKSI KEPENDUDUKAN DAN PEMUKIMAN	12	22	19	59	01	00	06
		CAMAT BONE-BONE	12	22	19	60	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	60	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	60	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	60	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA/KELURAHAN	12	22	19	60	01	00	05
		SEKSI KEPENDUDUKAN DAN PEMUKIMAN	12	22	19	60	01	00	06
		KELURAHAN BONE-BONE	12	22	19	60	02	00	01
		CAMAT TANA LILI	12	22	19	61	01	00	01
		SEKRETARIAT	12	22	19	61	01	00	02
		SEKSI TATA PEMERINTAHAN	12	22	19	61	01	00	03
		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	22	19	61	01	00	04
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DESA/KELURAHAN	12	22	19	61	01	00	05
		SEKSI KEPENDUDUKAN DAN PEMUKIMAN	12	22	19	61	01	00	06

PARAF HIRARKI	
Kepala DPPKAD	
Sekretaris DPPKAD	
Kabid Aset DPPKAD	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI